

**PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN
TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK DI KANTOR
PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA BANDAR LAMPUNG**

**Oleh
¹Delli Maria**

¹ Jurusan Akuntansi – Fakultas Ekonomi
Informatics & Business Institute Darmajaya
Jl. Z.A Pagar Alam No.93 Bandar Lampung Indonesia 35142
Telp: (0721)-787214 Fax (0721) -700261
Email : de_meriam@yahoo.co.id

Abstract

This study aims to prove the effect of the modernizing tax administration system with the level of compliance of employers Tax Service Office (KPP) Primary area of Bandar Lampung . The study was conducted at the Tax Service Office (KPP) Primary area in Bandar Lampung , Teluk Betung , Tanjung Karang and Kedaton. The method used in this research is descriptive qualitative method and verification approach . Questionnaires distributed to the Taxable Person (PKP) are listed in the Tax Service Office (KPP) Primary area in Bandar Lampung . Hypothesis testing techniques performed using the t test . The results show the implementation of the modernization of the tax administration system in Tax Service Office (KPP) in Bandar Lampung significant effect on the level of compliance Taxable Person with the positive direction of the relationship . This suggests that the higher the modernization of the tax administration system provided by the Tax Service Office (KPP) and will increase compliance Taxable Person (PKP) in paying the taxes.

Keywords : Systems Administration Modernization , Tax Taxable , Tax Compliance

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh modernisasi pada sistem administrasi perpajakan dengan tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama wilayah Bandar Lampung. Studi ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah Lampung Bandar, yaitu KPP Pratama Teluk Betung, KPP Tanjung Karang dan KPP Pratama Kedaton. Obyek penelitian ini adalah Pengusaha Kena (PKP) terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di wilayah Bandar Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Kuesioner disebarkan pada Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di wilayah Lampung Bandar. Teknik uji hipotesis dilakukan menggunakan uji t. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan modernisasi sistem administrasi perpajakan pada KPP Pratama di kota Bandar Lampung berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan arah hubungan positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi modernisasi sistem administrasi perpajakan yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan akan meningkatkan kepatuhan Kena Pajak (PKP) dalam membayar pajak.

Kata kunci: Sistem Modernisasi Administrasi, Pengusaha Kena Pajak, Kepatuhan Pajak

PENDAHULUAN

Faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2009: 82). Administrasi baik tentunya karena instansi pajak, sumber daya aparat pajak dan prosedur perpajakannya baik.

Perbaikan pelayanan lewat program perubahan (*Change Program*), penegakan hukum dan pelaksanaan kode etik yang lebih baik harus diprioritaskan agar administrasi perpajakan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Tuntutan akan peningkatan penerimaan, peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak serta perbaikan-perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan tersebut dapat berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan sehingga bias meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya, meningkatkan tanggung jawab aparatur pemerintah agar tidak melakukan kecurangan dan melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya dan

dapat meningkatkan potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal. Kalau ditinjau dari konsep produktivitas penerimaan pajak, jika organisasi ingin meningkatkan penerimaan pajaknya, maka organisasi harus respon terhadap perubahan yang terjadi (Generalis, 2000). Kegagalan merespon perubahan berarti melewatkan peluang atau malah menciptakan masalah. Oleh karena itu, reformasi (modernisasi) adalah hal yang tidak terhindarkan.

Menurut (Rahayu dan Lingga, 2009), program reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri khusus antara lain struktur organisasi yang dirancang berdasarkan fungsi, tidak lagi menurut seksi-seksi berdasarkan jenis pajak, perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui pembentukan *account representative* dan *compliant center* untuk menampung keberatan Wajib Pajak. Sistem administrasi perpajakan modern juga mengikuti kemajuan teknologi dengan pelayanan yang berbasis *e-system* seperti *e-SPT*, *e-Filing*, *e-Payment*, dan *e-Registration* yang diharapkan meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif yang ditunjang dengan penerapan Kode Etik Pegawai

Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas dan pelaksanaan *good governance*.

Dalam penelitian ini penulis menganalisis tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai subjek pajak/wajib pajak PPN karena pertama berbagai perubahan dalam UU tentang PPN (terakhir UU No. 42 tahun 2009) mencakup juga berbagai aspek yang terkait erat dengan dimensi modernisasi pajak. Selain itu, kewajiban perpajakan PKP relatif mempunyai frekuensi tinggi karena SPT yang bersifat masa (bulanan) tidak tahunan seperti halnya wajib pajak orang pribadi dan badan. Kemudian belum banyak penelitian sebelumnya yang mengambil Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai objek penelitian.

Kedua adalah, meskipun besaran penerimaannya belum sebesar PPh, kontribusi PPN terhadap pendapatan Negara sangatlah signifikan. Menurut Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI, Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) naik hampir dua kali lipat dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu dari Rp 123 triliun pada tahun 2006 menjadi 232,2 triliun pada tahun 2010. Angka ini lebih kurang 30% dari total penerimaan Negara dari pajak. Untuk tahun 2011 penerimaan

PPN mencapai 277,73 triliun, jika dibandingkan dengan penerimaan PPN tahun 2010, maka penerimaan PPN mengalami peningkatan, tetapi apabila dilihat dari perjenis pajaknya untuk tahun 2011, maka PPN memiliki pencapaian target paling rendah. Meskipun demikian, PPN mengalami kinerja pertumbuhan sebesar 20,45%, yang tergolong relatif baik.

Kurang tercapainya penerimaan PPN di Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang ada di Bandar Lampung yaitu KPP Teluk Betung, KPP Tanjung Karang dan KPP Kedaton karena tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak dalam menyeter PPN masih rendah dan juga bahwa masih banyak transaksi yang tidak tercatat atau yang dikenal dengan ekonomi bawah tanah (*Underground Economy*), sehingga penerimaan PPN tidak mencapai target. (Manurung, 2002) menemukan bahwa sekitar 22% untuk setiap Kanwil Pajak terdapat PKP yang bukan pembayar pajak. Peran serta Wajib Pajak dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya target penerimaan pajak.

Signifikannya peran pajak dalam pembangunan bangsa dan pentingnya modernisasi system perpajakan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, menjadi motivasi penulis untuk melakukan penelitian

kembali mengenai pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak di kantor pelayanan pajak (KPP) pratama. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana pengaruh pelaksanaan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandar Lampung.

LANDASAN TEORI

Pajak

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Waluyo (2007:2)

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2009:25), menjalankan fungsinya sebagai (1) Fungsi Budgetair, yaitu berfungsi untuk menutup biaya yang harus dikeluarkan pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahannya. (2) Fungsi Regulered, yaitu pajak

merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Merupakan fungsi lain dari pajak sebagai fungsi budgetair.

Subjek pajak Waluyo (2007:57) terdiri dari: Orang Pribadi dan Badan. Sedangkan Objek Pajak yaitu: Penghasilan, Laba usaha, Hadiah dari undian atau pekerjaan, Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta; dan Deviden.

Tarif pajak yang menurut Waluyo dan Wirawan B. Ilyas (2003:16) adalah sebagai berikut : Tarif sebanding/proporsional, Tarif tetap, Tarif *progresif* dan Tarif *Degresif*. Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, Siti Resmi (2007:10) yaitu *official assesment system, self assesment system, with holding system,*

Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Menurut A. Dunsire, yang dikemukakan kembali oleh Siti Kurnia Rahayu (2009:92) administrasi diartikan sebagai berikut: Sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan, implementasi, mengarahkan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan,

sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritis akademik dan teoritis. Menurut Sophar Lumbantoran (2009:93), yang dikemukakan kembali oleh Siti Kurnia Rahayu, administrasi perpajakan diartikan sebagai berikut : Administrasi Pajak (*Tax Administration*) ialah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak.” Menurut Marcus Taufan Sofyan (2005:53)

Pada dasarnya sasaran administrasi perpajakan adalah upaya peningkatan kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan pelaksanaan ketentuan perpajakan secara sama antara Fiskus dan Wajib Pajak dalam menilai suatu ketentuan untuk mendapatkan penerimaan pajak maksimal dengan biaya optimal.

Tingkat kepatuhan Pengusaha kena pajak

Tingkat kepatuhan Pengusaha kena pajak yang ditulis oleh Waluyo (2000:312) dalam bukunya Perpajakan Indonesia, menyatakan bahwa: “Pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang perpajakan pertambahan nilai, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasnya ditetapkan oleh menteri

keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak”.

Kriteria pengusaha pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dalam bukunya Perpajakan Konsep, Teori dan Isu yang ditulis oleh Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006 : 111), menyatakan bahwa: Kriteria wajib pajak patuh adalah: (1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir. (2) Tidak mempunyai tunggakan pajak atau untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. (3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bagian perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir. (4) Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%. (5) Wajib pajak yang laporan keuangan untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba fiscal.

Bangunan Hipotesis

Sistem perpajakan di suatu

negara, terdiri dari tiga unsur, yaitu : *Tax Policy*, *Tax Law*, dan *Tax Administration*, Siti Kurnia Rahayu (2006:25). Ketiga unsur tersebut saling menunjang satu sama lain, tidak dapat dipisahkan. Dan ketiga unsur tersebut harus sama kuat dan sama stabil, sehingga dapat menopang sistem perpajakan. Jika salah satu unsur lemah maka sistem perpajakan tidak akan stabil dan akan mengarah pada kerutuhan. Ketiga unsur tersebut juga saling bergantung satu sama lain untuk mencapai suatu sistem perpajakan yang baik.

Mengenai peran administrasi perpajakan, Liberty Pandiangan (2006:1) mengemukakan bahwa administrasi perpajakan diupayakan untuk merealisasikan peraturan perpajakan, dan penerimaan negara sebagaimana amanat APBN. Menurut Sophar Lumbantoruan (1997), yang dikemukakan kembali oleh Siti Kurnia Rahayu (2009:93), administrasi perpajakan diartikan sebagai berikut :“Administrasi Pajak (*Tax Adminsitration*) ialah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak.”Melalui modernisasi administrasi perpajakan, diharapkan terbangun pilar-pilar pengelolaan pajak yang kokoh sebagai fundamental penerimaan Negara yang baik dan berkesinambungan. Modernisasi sistem perpajakan

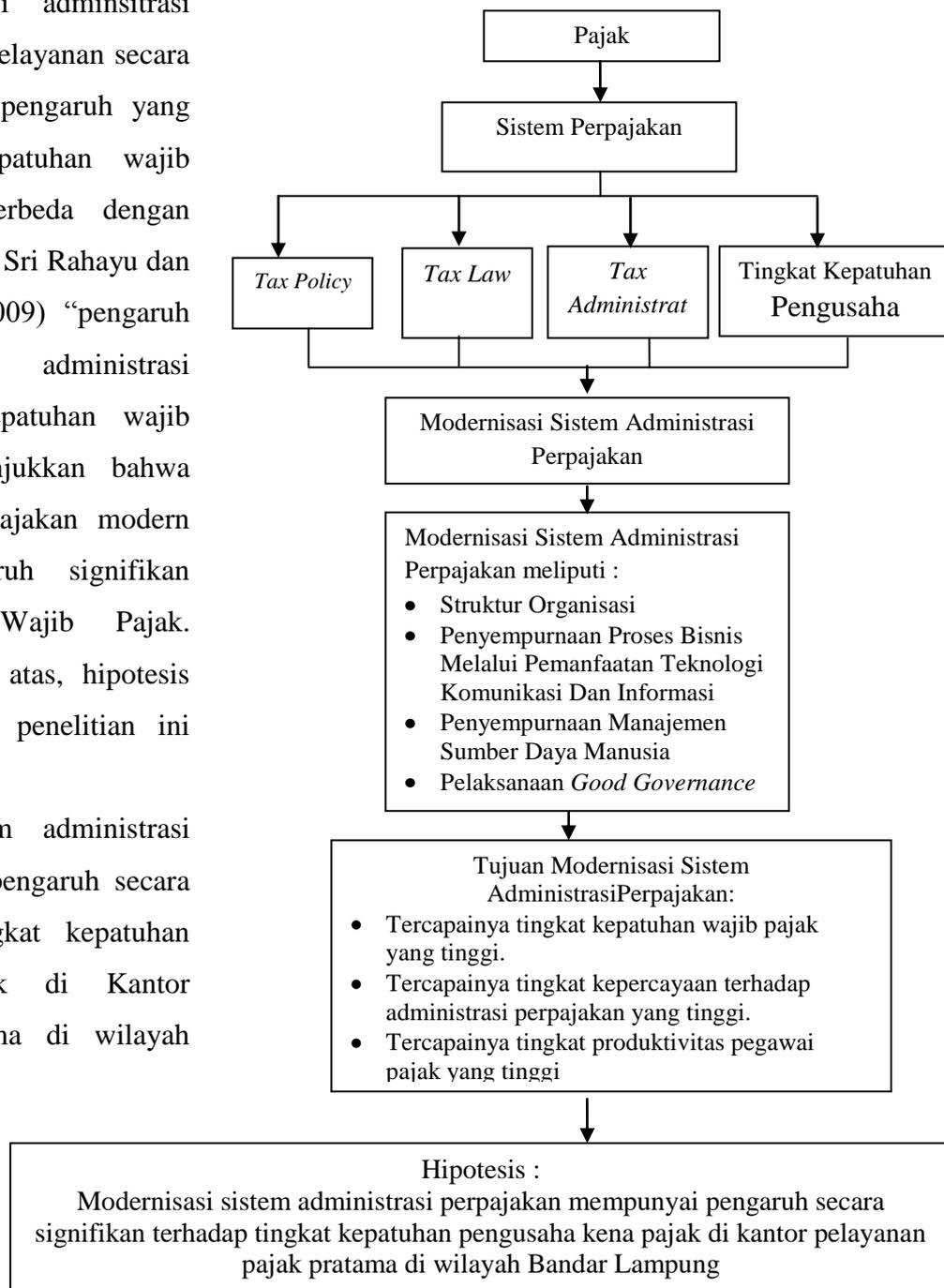
dilingkungan perpajakan Direktorat Jenderal Pajak bertujuan untuk menerapkan *Good Governance* dan pelayanan prima kepada masyarakat. Pengelolaan pajak mengalami perubahan besar yang terus dikembangkan ke arah modernisasi. Dengan demikian optimalisasi penerimaan pajak dapat terlaksana dengan baik, efektif, dan efisien. Jika program modernisasi ini ditelaah secara mendalam, termasuk perubahan-perubahan yang telah, sedang, dan akan dilakukan, maka dapat dilihat bahwa konsep modernisasi ini merupakan suatu terobosan yang akan membawa perubahan yang cukup mendasar dan revolusioner. Untuk mewujudkan itu semua, maka reformasi administrasi perpajakan perlu dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif.

Hasil penelitian Lasnofa Fasmi dan Fauzan Misra (2012) menunjukkan bahwa modernisasi system perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak. Sedangkan penelitian Dianne Dewintari (2011) terkait dengan Pengaruh pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kualitas pelayanan dan implikasinya pada kepatuhan wajib pajak badan (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Cicadas Bandung) menunjukkan bahwa pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan dan kualitas pelayanan secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hasil berbeda dengan penelitian yang dilakukan Sri Rahayu dan Ita Salsalina Lingga (2009) “pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak”, hasilnya menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan paparan di atas, hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

Ha: Modernisasi sistem administrasi perpajakan mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Bandar Lampung.

Kerangka Pemikiran



Gambar 1

BAB III

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Pratama yang terdapat di wilayah Bandar Lampung, yaitu : KPP Pratama Teluk Betung, KPP Pratama Tangjung Karang dan KPP Pratama Kedaton. Teknik

pengambilan sampel (*teknik sampling*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah *nonprobability sampling* dan pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling* (kriteria yang dikehendaki). Dengan kriteria sebagai berikut: (1) Pengusaha kena pajak (PKP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di wilayah Bandar

Lampung. (2) Pengusaha kena pajak (PKP) aktif yang melapor pajak terutangnya (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di wilayah Bandar Lampung. Dengan menggunakan rumus sampel minimal (Riduwan, (2005:65) $n = \frac{N}{N(d)^2} + 1$, Diperoleh minimal 96 sampel dan digernapkan menjadi 100 sampling.

memenuhi pernyataan-pernyataan tipe skala likert. 5=sangat setuju, 4=setuju,

Tabel Definisi Operasional Variable

Definisi Variabel	Definisi	Variabel Manifest (Indikator)	Sumber data
Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (<i>dependent</i>) (Y)	Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. Siti Kurnia (2006:110)	1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri 2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT 3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang 4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak	Primer
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (<i>independent</i>) (X)	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi baik secara individu, kelompok maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat. (Suparman 2007:1)	1. Struktur organisasi 2. Prosedur organisasi 3. Strategi organisasi 4. Budaya organisasi	Primer

3=Netral, 2=Tidak Setuju dan 1=Sangat Tidak Setuju. (Sugiyono (2006:86))

Skala Pengukuran

Penulis memperoleh langsung data-data yang dibutuhkan berdasarkan dari keterangan dan informasi yang diberikan responden melalui angket (kuesioner) yang telah disebar dengan metode skor. Variabel-variabel tersebut diukur oleh instrumen pengukur dalam bentuk kuesioner berskala ordinal yang

Metode Analisis Data

Uji Validitas

Tingkat validitas dapat diukur dengan cara membandingkan nilai *r* hitung dengan nilai *r* tabel untuk *degree of freedom* (df) = n - k dengan alpha 0,05.

Jika *r* hitung lebih besar dari *r* tabel dan

nilai r positif, maka butir atau pernyataan tersebut dinyatakan valid.

Uji Reliabelitas

Suatu konstruk/variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach alpha (α) > 0.60 dan dikatakan tidak reliabel jika memberikan nilai cronbach alpha (α) ≤ 0.60 (Nunnaly, 1969 dalam Imam Ghozali, 2005:42).

Uji Normalitas

Uji normalitas dapat digunakan dengan alat analisis *grafik normal propability plot* dan *uji Kolmorov Smirnov*.

Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linier sederhana adalah alat analisis yang digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel *independent* (X) terhadap variabel *dependent* (Y). Jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ berarti ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat, atau bisa juga dengan signifikansi di bawah 0,05 (Duwi Priyatno, 2012:124)

Uji Hipotesis

Uji Statistik t

Uji signifikansi parameter individual (uji statistik t) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel

independen. Agar hasil perhitungan koefisien korelasi dapat diketahui signifikan/tidak signifikan maka hasil perhitungan dari statistik uji t (t_{hitung}) tersebut selanjutnya dibandingkan dengan t_{tabel} . Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ maka H_a ada di daerah penerimaan, berarti H_a diterima artinya antara variabel *independent* (X) dan variabel *dependent* (Y) ada hubungannya. Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka H_a ada di daerah penolakan, berarti H_a ditolak artinya antara variabel *independent* (X) dan variabel *dependent* (Y) tidak ada hubungannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pilot Test

Uji Validitas dan Reliabilitas Pilot Test Instrumen

Hasil Pilot test terkait dengan validitas instrumen menunjukkan hasil yang valid. 12 pertanyaan Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak semua r_{hitung} berada diatas r_{table} (0,355), $r_{hitung} > r_{table}$, yang berarti instrument dinyatakan valid. Dengan Cronbach Alpha 0,695 dan untuk Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak 0,833. Hal ini menunjukkan kedua instrument adalah Reliable.

Deskriptif Responden

Tabel 2
Karakteristik Responden

Responden	Jumlah Responden	Persentase
Pengusaha Kena Pajak	100	100 %
Kuesioner	Jumlah Responden	Persentase
Kuesioner Kembali	96	96 %
Kuesioner Gugur	4	4 %
Jumlah	100	100 %
Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
Laki-laki	68	70,8 %
Perempuan	28	29,2 %
Jumlah	96	100 %
Usia	Jumlah Responden	Persentase
22 - 30 Tahun	58	60,4 %
31 - 46 Tahun	35	36,5 %
47 - 64 Tahun	3	3,1 %
Jumlah	96	100 %

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2013

Uji Normalitas Sampel Penelitian

Tabel 3
Hasil uji Normalitas, uji kolmogorov smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		32
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	2,65817514
	Absolute	,133
Most Extreme Differences	Positive	,108
	Negative	-,133
Kolmogorov-Smirnov Z		,753
Asymp. Sig. (2-tailed)		,622

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data diolah melalui SPSS Ver. 20

Hasil uji pada tabel 3 menunjukkan data berdistribusi normal, ini dapat dilihat dengan nilai Asymp.Sig. (2-tailed) yang > 0.05.

Uji Regresi Linier Sederhana

Tabel 4
Hasil Uji Regresi Linier Sederhana

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
								(Constant)
1	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	,223	,104	,365	2,148	,040	1,000	1,000

a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

Sumber : Data diolah melalui SPSS Ver. 20

Tabel 5
Hasil Uji Korelasi Correlations

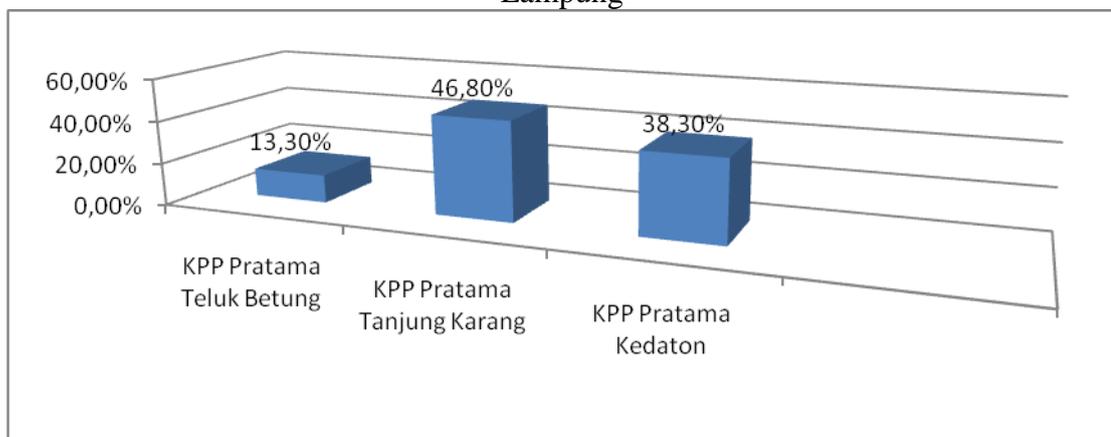
		Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	Pearson Correlation	1	,365*
	Sig. (2-tailed)		,040
	N	32	32
Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak	Pearson Correlation	,365*	1
	Sig. (2-tailed)	,040	
	N	32	32

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber : Data diolah melalui SPSS Ver. 20

Tingkat kepatuhan PKP di KPP Pratama di Bandar Lampung

Grafik Persentase tingkat kepatuhan PKP di KPP Pratama di Wilayah Bandar Lampung



Grafik diatas menggambarkan persentase tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang ada di wilayah Bandar Lampung.

Bila dilihat berdasarkan persentase maka terlihat tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Kantor Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Karang tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebesar 46,80 %, dan untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kedaton tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebesar 38,30 %. Tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) tertinggi berada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Karang dengan persentase sebesar 46,80 %, dan tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) terendah berada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Teluk Betung dengan persentase sebesar 13,30 %.

Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah terdapat hubungan antara modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandar Lampung yang diukur dengan program SPSS versi 20 yang dilakukan Dengan uji validitas, uji reliabelitas, uji normalitas, analisis regresi linier sederhana, uji korelasi, koefisien determinasi, dan uji statistik t. Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal (58) Peraturan Menteri

Pajak (KPP) Pratama Teluk Betung sebesar 13,30 %, untuk Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007, KPP Pratama mempunyai tugas yaitu melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan wajib pajak dibidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, serta perolehan hak atas tanah dan bangunan dalam wewenang berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku.

Berdasarkan pembuktian hipotesis yang dilakukan diatas terdapat hubungan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di wilayah Bandar Lampung yaitu : di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Teluk Betung, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Karang, dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kedaton.

Melalui uji normalitas dengan menggunakan normal *propability plot* dan *one-sample kolmogorov-smirnov* yang dilakukan dengan program SPSS

versi 20 bahwa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Teluk Betung, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Karang, dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kedaton bahwa dapat dikatakan data yang digunakan berdistribusi normal karena nilai *residualnya* yang berada diatas tingkat signifikansinya 0,05.

Untuk hasil uji statistik yaitu berdasarkan uji regresi linier sederhana bahwa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Teluk Betung mempunyai nilai konstanta (a) sebesar 25,571 artinya jika modernisasi sistem administrasi perpajakan nilainya adalah 0, maka tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak nilainya 0,365. untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Karang mempunyai nilai konstanta (a) sebesar 16,068 artinya jika modernisasi sistem administrasi perpajakan nilainya adalah 0, maka tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak nilainya 0,684. Dan untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Kedaton mempunyai nilai konstanta (a) sebesar 20,646

Hasil uji korelasi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Teluk Betung, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Karang, dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kedaton mempunyai hubungan yang kuat dan

positif antara modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Dari output diperoleh nilai signifikansi (*sig 2-tailed*) sebesar 0,04 pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Teluk Betung, untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Karang sebesar 0,00, dan untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kedaton mempunyai nilai signifikansi 0,00. Karena nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_a diterima.

Berdasarkan uji statistik koefisien determinasi untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Teluk Betung didapat nilai *R Square* sebesar 0,133 atau 13,3 %. Angka 13,3 % memberi arti bahwa perubahan tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Teluk Betung dipegaruhi oleh modernisasi sistem administrasi perpajakan sebesar 13,3 %. untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Karang didapat nilai *R Square* sebesar 0,468 atau 46,8 %. Angka 46,8 % memberi arti bahwa perubahan tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Karang dipegaruhi oleh modernisasi sistem administrasi perpajakan sebesar 46,8 %. Dan untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kedaton didapat nilai R

Square sebesar 0,383 atau 38,3 %. Angka 38,3 % memberi arti bahwa perubahan tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Teluk Betung dipegaruhi oleh modernisasi sistem administrasi perpajakan sebesar 38,3 %

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pelaksanaan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandar Lampung. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengusaha kena pajak (PKP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di wilayah Bandar Lampung. Adapun data sampel pengamatan sebanyak 96 kuesioner. Data diolah dengan menggunakan program komputer SPSS versi 20. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan pembahasan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan modernisasi sistem administrasi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di wilayah Bandar

Lampung sudah termasuk sangat baik.

2. Tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di wilayah Bandar Lampung tertinggi yaitu pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Karang, dan tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) terendah yaitu pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Teluk Betung.
3. Pelaksanaan modernisasi sistem administrasi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di wilayah Bandar Lampung berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), dengan arah hubungan positif.

Keterbatasan

Penelitian ini hanya mengkaji pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak tanpa mengukur tingkat kepatuhan sebelum dan sesudah diterapkannya modernisasi sistem administrasi perpajakan.

Saran

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Bandar Lampung disarankan untuk lebih meningkatkan modernisasi sistem administrasi perpajakan.
2. Bila ingin tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak semakin tinggi pada masing – masing Kantor Pelayanan Pajak Patama di wilayah Bandar Lampung, diharapkan meningkatkan kesadaran wajib pajak diiringi peningkatan fiskus agar lebih kuat dalam pengawasan karena temuan penelitian ini menunjukkan bahwa patuh dalam mendaftar sebagai wajib pajak/pengusaha kena pajak tidaklah jaminan bahwa wajib pajak juga akan patuh dalam perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak.
3. Bagi penelitian kedepan, sebaiknya mengembangkan penelitian ini dengan mengukur tingkat kepatuhan sebelum dan sesudah diterapkannya modernisasi sistem administrasi perpajakan.

Administrasi Perpajakan Terhadap Kualitas Pelayanan Dan Implikasinya Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan, Skripsi

Ely Suhayati, Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan "Teori dan Teknis Perhitungan"*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Erly Suandy, 2006, *Perpajakan*, Edisi Pertama, Jakarta: Salemba Empat.

Generalis, Georgios B. 2000. *A Methodology for Measuring Productivity and Improving Service Responsiveness in a Tax Collection Agency*. Dissertation, University of Miami.

Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate* dengan program SPSS, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate* dengan program IBM SPSS 19, Edisi 5, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Hadi, Sutrisno. (1996). *Metodologi research*, (edisi kesepuluh), Yogyakarta: Andi offset.

Indriantoro, Nur, & Supomo, Bambang, 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Indeks.

Joko Subagyo, 1997, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta

Lasnofa Fismi dan Fauzan Misra, 2012, *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang*, Skripsi

DAFTAR PUSTAKA

- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu, 2006, *Perpajakan: Konsep, Teori dan isu*, Kencana, Jakarta.
- Dewintari, Dianne 2011 *Pengaruh Pelaksanaan Modernisasi*

- Liberty, Pandiangan, 2006, *Pemahaman Praktis Undang-undang Perpajakan Indonesia*, Erlangga, Jakarta
- Liberty, Pandianga. 2008. *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo (Kelompok Gramedia).
- Manurung, Romulus. 2002. Analisa Dampak Kajian Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 terhadap Penerimaan PPN Sektor Pertanian. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, Volume 6 Nomor 4, Desember 2002: 71-85.
- Mardiasmo, 2009, *Perpajakan*, Yogyakarta : ANDI
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE.
- Priyato. Duwi, 2012. *Cara Kilat Belajar Analisis dengan SPSS 20*. CV. Andi offset. Yogyakarta
- Rahayu dan Lingga. 2009. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Akuntansi* Vol.1 No.2 November 2009:119-138
- Rahayu, Siti Kurnia. 2009. *Perpajakan Indonesia "Konsep dan Aspek Formal"*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Rahayu, Sri. 2009. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung. *Jurnal Akuntansi*. Vol. 1, No. 2: 119-138
- Riduwan. 2005. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, Bandung: Alfabeta
- Salip, dan Tedy Wato, 2007. "Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Studi Kasus: di KPP Jakarta Kebon Jeruk". *Jurnal Keuangan Publik* Vol 4 : 61-81.
- Santoso, S. 2010. *Statistik Multivariat Konsep dan Aplikasi dengan SPSS*. Jakarta: PTElex Media Komputindo.
- Santoso, Singgih 2002; *Mengatasi Berbagai Masalah Statistik dengan SPSS Versi 11.5*, (Jakarta : Elex Media Komputindo)
- Siti Resmi. 2003. "Buku Satu Perpajakan Teori dan Kasus". Penerbit: Salemba Empat. Jakarta.
- Siti Resmi, 2007, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Dua, Jakarta: Salemba Empat
- Siti Kurnia Rahayu dan Sony Devano, 2009, *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu, Satu*, Jakarta: Kencana
- Sugiono, 2006, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta
- Sugiono, 2008, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, 2007. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. edisi keempat Bandung: Afabeta.
- Suparman. 2007. *Catatan Praktek Perpajakan Kita*.
- Taufan, Marcus 2005, *Pengaruh Sisten Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak*, Skripsi.
- Waluyo, 2000, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.

Waluyo, 2007, *Perpajakan Indonesia*,
Dua, Jakarta: Salemba Empat

Waluyo, dan Wirawan B Ilyas, 2003,
Perpajakan Indonesia, Jakarta: Salemba
Empat

Warsito, Hermawan. 1992. *Pengantar
Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama